



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PEMBANGUNAN PROYEK MRT LINTAS TIMUR-BARAT

Nidya Waras Sayekti
Analisis Legislatif Ahli Madya
nidya.ws@dpr.go.id

Fitria Melinda
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fitria.melinda@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo resmi mencanangkan pembangunan Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Lintas Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 pada tanggal 11 September 2024. Proyek MRT Lintas Timur-Barat Fase 1 terdiri dari dua tahapan: Fase 1 Tahap 1 akan menghubungkan Medan Satria dan Tomang sepanjang 24,5 kilometer, sedangkan Fase 1 Tahap 2 akan memperpanjang jalur dari Tomang ke Kembangan sepanjang 9,2 kilometer. Nantinya, Stasiun Thamrin akan menjadi titik integrasi utama yang menghubungkan jalur Timur-Barat yang sedang dibangun dengan jalur Utara-Selatan yang telah beroperasi. Pembangunan MRT Lintas Timur-Barat merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang menjadi langkah penting dalam pengembangan sistem transportasi massal di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Rencananya, jalur MRT Lintas Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 membentang dari Tomang, Grogol, Roxy, Petojo, Cideng, Thamrin, Kebon Sirih, Kwitang, Senen, Galur, Cempaka Baru, Sumur Batu, Pakulonan Barat, Pakulonan Timur, Perintis, Pulogadung, Penggilingan, Cakung Barat, Pulo Gebang, Ujung Menteng, hingga Medan Satria. Waktu tempuh yang ditargetkan untuk jalur tersebut adalah 45 menit dengan estimasi penumpang 284.900 orang per hari. Pada tahap ini, akan dioperasikan 23 rangkaian kereta, masing-masing terdiri dari delapan gerbong.

Proyek MRT Lintas Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 akan mencakup 21 stasiun, terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun *elevated*, serta sebuah depo di daerah Rorotan. Fase 1 Tahap 2 akan menambahkan 6 stasiun *elevated* tambahan. Rute *elevated* mencakup stasiun dari Tomang ke Grogol dan dari Cempaka Baru ke Medan Satria. Sementara, rute bawah tanah meliputi stasiun di Roxy, Petojo, Cideng, Thamrin, Kebon Sirih, Kwitang, Senen, dan Galur. Tahapan pembangunan dimulai dengan pencanangan proyek pada 11 September lalu, dilanjutkan dengan proses tender untuk penentuan kontraktor yang akan dimulai pada 2025 dan konstruksi jalur kereta ditargetkan akan selesai pada 2031.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Mass Rapid Transit* (MRT) Koridor Timur-Barat Fase I, Kementerian Perhubungan akan berperan sebagai *executing agency*, bertanggung jawab sebagai regulator dan pengawas dana hibah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan berfungsi sebagai *implementing agency*, sedangkan PT MRT Jakarta akan berperan sebagai *sub-implementing agency*. Proporsi pendanaan yang diterapkan ialah 49% pemerintah pusat melalui hibah (*on granting*) dan 51% oleh Pemprov DKI Jakarta melalui pinjaman (*on lending*). Pinjaman tahap pertama bersumber dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diterima pemerintah pusat, lalu diterushibahkan dan diteruspinjamkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Pembangunan Fase 1 Tahap 1 dan 2 MRT Jakarta Lintas Timur-Barat membutuhkan biaya total sekitar Rp51,8 triliun. Pendanaan proyek MRT Lintas Timur-Barat Fase 1 Tahap 1 menggunakan

skema *co-financing* Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Asian Development Bank (ADB) dengan pinjaman sebesar Rp14,12 triliun. Pinjaman tersebut memiliki suku bunga sebesar 0,3% dengan masa pengembalian 40 tahun, termasuk masa tenggang selama 10 tahun, dan total pinjaman mencapai sekitar Rp15 triliun. Estimasi anggaran pembangunan MRT Fase 1 Tahap 1 dan Tahap 2 sangatlah besar. Karena pendanaan bersumber dari pinjaman, pemerintah diharapkan dapat melaksanakan pembangunan sesuai kalkulasi biaya infrastruktur secara akurat, sehingga ke depan tidak terjadi pembengkakan biaya infrastruktur yang akan membebani negara. Pemerintah juga sebaiknya melakukan reorientasi pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas, apakah untuk pemerataan ekonomi, mengurangi disparitas, konektivitas antar pulau ataukah sekedar infrastruktur dalam kota.

Atensi DPR

Proyek MRT Lintas Timur-Barat Fase 1, yang baru saja dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 11 September 2024, memerlukan perhatian khusus dari Komisi V DPR RI. Dengan total anggaran yang sangat besar sekitar Rp51,8 triliun, maka pengawasan dalam proses tender, pengelolaan dana, dan jadwal konstruksi sangatlah krusial. Komisi V DPR RI diharapkan dapat memantau efektivitas pelaksanaan proyek ini serta memastikan koordinasi yang baik antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pihak lainnya. Dampak kemacetan lalu lintas akibat pembangunan proyek ini juga perlu diantisipasi oleh Kemenhub dan pihak Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polri. Pengawasan dari Komisi V DPR RI diperlukan untuk memastikan bahwa proyek ini memenuhi target baik biaya maupun jangka waktu konstruksinya. Dengan beroperasinya MRT Lintas Timur-Barat dapat memberikan manfaat maksimal dalam hal transportasi bagi masyarakat.

Sumber

antaranews.com, 13 September 2024;
Bisnis Indonesia, 13 September 2024;
detik.com, 11 September 2024;
dephub.go.id, 11 September 2024;
kompas.com, 11 September 2024;
kompas.id, 11 September 2024;
kontan.co.id, 12 September 2024;
liputan6.com, 11 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.